

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Teori keagenan adalah kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) mendelegasikan wewenang kepada pihak tertentu (*agent*) untuk melakukan suatu pekerjaan (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan pemerintah dianggap sebagai *agent* dan masyarakat dianggap sebagai *principal*. Teori keagenan akan menjawab mengenai masalah keagenan yang muncul antara pihak yang saling bekerja sama. Dalam Eisenhardt (1989), menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi yaitu asumsi sifat manusia (*human assumptions*), asumsi keorganisasian (*organizational assumptions*), dan asumsi informasi (*information assumptions*). Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. *Self-interest*: yaitu sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri
2. *Bounded-rationality*: yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas
3. *Risk aversion*: yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko.

Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Konflik sebagai tujuan antar partisipan

2. Efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas
3. Asimetri informasi antara pemilik dan agen.

Perbedaan tujuan antara *principal* dan *agent* akan menyebabkan terjadinya masalah keagenan. Teori keagenan menganggap terjadinya *information asymmetry* antara *agent* (pemerintah) yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* memungkinkan terjadi tindak korupsi yang dilakukan oleh *agent*. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kinerja untuk dapat mengurangi *information asymmetry*.

Berdasarkan teori keagenan, pengelolaan pemerintah daerah khususnya instansi pemerintah dilakukan harus dengan pengawasan guna memastikan pengelolaan yang dijalankan berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Memberikan informasi yang berimbang serta akurat menjadi wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat.

2.1.2. Sistem Pengendalian Internal

2.1.2.1. Definisi Sistem Pengendalian Internal

Menurut Romney & Steinbart (2015) pengendalian internal adalah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian terpenuhi. Sistem pengendalian internal diperlukan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Sistem pengendalian internal dan prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Pengertian lain dikemukakan oleh Arens (2006), pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang efektif akan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipercaya, penggunaan sumber daya organisasi akan lebih efektif dan efisien, serta menurunkan tingkat pelanggaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi.

Sementara menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission*) mendefinisikan pengendalian internal:

“A process, effected by entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding to achievement of objectives in the following categories-effectiveness and efficiency of operations, reliability financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations”.

Dari beberapa definisi yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang ada dalam organisasi yang dirancang guna memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan oleh organisasi telah

sesuai dengan standar aturan yang sudah ditetapkan. Pengendalian internal dalam kaitannya bagaimana tiap individu melaksanakan tugas, menetapkan kebijakan, dan otoritas secara bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi.

2.1.2.2. Komponen-komponen Pengendalian Internal

Menurut COSO *Framework*, terdapat 5 prinsip pengendalian internal:

1. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur yang mencerminkan perilaku menyeluruh manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas tentang pengendalian internal dan arti pentingnya bagi entitas. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, perlu mempertimbangkan komponen pengendalian berikut:

- a. Komunikasi dan penegakan nilai integritas dan etika

Integritas dan perilaku etis merupakan produk standar etika dan perilaku entitas, bagaimana standar tersebut dikomunikasikan, dan bagaimana standar diperkuat dalam praktik.

- b. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen tentang tingkat kompetensi untuk tugas tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan keterampilan dan pengetahuan.

- c. Partisipasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola

d. Kesadaran pengendalian suatu entitas dipengaruhi secara signifikan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola

e. Filosofi dan gaya operasi manajemen

Pemahaman tentang hal ini dan aspek-aspek serupa dari falsafah dan gaya operasi manajemen akan memberikan gambar tentang bagaimana sikap manajemen terhadap pengendalian internal.

f. Struktur organisasi

Struktur organisasi entitas merumuskan pertanggungjawaban dan kewenangan.

g. Pemberian wewenang dan tanggung jawab

Wewenang dan tanggung jawab dapat mencakup kebijakan yang berkaitan dengan praktik bisnis yang tepat, pengetahuan dan pengalaman personel kunci, dan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas.

h. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Aspek terpenting dari pengendalian internal adalah manusia. Mengingat betapa pentingnya personel yang kompeten dan bisa dipercaya untuk terciptanya pengendalian yang efektif, maka metoda rekrutmen pegawai, penilaian, pelatihan, promosi, dan kompensasi menjadi bagian yang penting dalam pengendalian internal.

2. Penilaian risiko adalah identifikasi risiko bisnis yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan entitas yang berlaku, meng estimasi signifikansi risiko bisnis tersebut,

menilai kemungkinan kejadiannya, dan memutuskan tindakan untuk merespon dan mengelola risiko.

3. Sistem informasi dan komunikasi mencakup penyediaan pemahaman peran dan tanggung jawab individu terkait dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
4. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu dalam memastikan bahwa tindakan yang perlu dilakukan untuk menghadapi risiko guna tercapainya tujuan entitas.

- a. Penelaahan Kinerja

Aktivitas pengendalian yang mencakup penelaahan dan analisis kinerja aktual, menghubungkan serangkaian data yang berbeda, bersama dengan analisis hubungan dan tindakan investigasi dan korektif, membandingkan data internal dengan sumber informasi eksternal, serta menelaah kinerja fungsional atau kinerja aktivitas.

- b. Pengolahan Informasi

Pengendalian berupa kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan banyak aplikasi yang mendukung berfungsinya pengendalian aplikasi secara efektif dengan membantu untuk menjamin beroperasinya sistem informasi secara tepat dan berkelanjutan.

- c. Pengendalian Fisik

Pengendalian fisik yang ditujukan untuk mencegah pencurian aset, otorisasi atas akses program komputer dan *file*, serta menjaga akuntabilitas pencatatan dalam catatan akuntansi.

d. Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas dimaksudkan untuk mengurangi peluang kemungkinan individu untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau kecurangan dalam tugasnya.

5. Pemantauan terhadap pengendalian adalah suatu proses untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengendalian internal. Kegiatan ini melibatkan penilaian efektivitas pengendalian secara berkala dan tepat waktu, serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

2.1.2.3. Fungsi Pengendalian Internal

Menurut Romney dan Steinbart (2015), pengendalian internal menjalankan tiga fungsi penting sebagai berikut:

1. Pengendalian preventif (*preventive control*), yaitu mencegah masalah sebelum timbul.
2. Pengendalian detektif (*detective control*), yaitu menemukan masalah yang tidak terelakkan.
3. Pengendalian korektif (*corrective control*), yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkannya dari kesalahan yang dihasilkan.

2.1.2.4. Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2010), terdapat empat tujuan utama dalam pengendalian internal:

1. Keandalan Laporan Keuangan

Pengendalian internal membuat manajemen bertanggung jawab menyiapkan laporan keuangan untuk pihak internal dan eksternal organisasi. Laporan keuangan harus disajikan secara akuntabel.

2. Kepatuhan Terhadap Hukum

Pengendalian internal diterapkan dalam organisasi agar setiap pegawai yang terlibat di dalamnya melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Efektivitas dan Efisiensi Operasi

Pengendalian internal menjadi alat untuk membantu organisasi mengurangi kegiatan yang bersifat pemborosan.

4. Keterbatasan Bawaan dalam Pengendalian Internal

Keterbatasan bawaan dalam pengendalian internal berupa kesalahan dalam pertimbangan, gangguan, kolusi, dan pengabaian oleh organisasi.

2.1.3. Sistem Informasi Akuntansi

2.1.3.1. Definisi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2015), sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan.

Sedangkan menurut Patel (2015), sistem informasi akuntansi merupakan subsistem informasi dalam suatu organisasi dimana digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sub sistem dan mengelola informasi tersebut yang kemudian dikomunikasikan dan diproses untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Hal serupa dikemukakan oleh Jogiyanto (2005), mendefinisikan sistem informasi akuntansi adalah:

“Sekumpulan kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam pengendalian dan perencanaan sekarang dan operasi masa depan serta pelaporan eksternal kepada pemegang saham, pemerintah dan pihak-pihak lainnya”.

Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk menghasilkan suatu informasi dengan melakukan kegiatan mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memproses hingga menghasilkan suatu informasi akuntansi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2.1.3.2. Komponen-komponen dalam Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2015), terdapat enam komponen dari sistem informasi akuntansi, yaitu:

1. Orang yang menggunakan sistem
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data

3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data
5. Infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat periferan
6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi.

Enam komponen tersebut memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi tiga fungsi penting, yaitu:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas sumber daya, dan personel organisasi
2. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen data merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel
3. Memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi.

2.1.3.3. Manfaat Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Menurut Romney & Steinbart (2015), pemanfaatan sistem informasi yang diterapkan dengan baik akan memberikan manfaat dan menambah nilai bagi suatu organisasi dengan:

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya dari produk atau layanan (jasa)
2. Meningkatkan efisiensi
3. Berbagi pengetahuan

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya (*supply chains*)
5. Memperbaiki struktur pengendalian internal
6. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk pengambilan keputusan.

2.1.4. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2010), laporan keuangan merupakan hak publik yang harus disajikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Hak publik untuk mendapatkan informasi keuangan muncul dikarenakan konsep pertanggungjawaban. Masyarakat yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi yang digunakan sebagai bahan evaluasi serta kontrol kepada pemerintah. Informasi laporan keuangan daerah harus sesuai dengan prinsip ketepatan dalam mengelola keuangan daerah. Diperlukan kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah kepada publik.

Pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas pengelolaan keuangan yang dilakukan harus dikomunikasikan kepada publik maupun pengguna informasi dengan terbuka baik melalui media umum maupun media yang sudah disediakan oleh instansi pemerintah itu sendiri. Dengan kemudahan akses yang diberikan, instansi pemerintah akan dapat menerima *feedback* yang kemudian dapat dijadikan masukan atau koreksi dalam pengelolaan keuangan yang sudah dilakukan. Pada saat ini, kemudahan akses informasi juga dapat diperoleh dari berbagai media seperti internet, surat kabar, dan *platform digital*. Menurut Sande

(2013), terdapat 2 indikator pengukuran variabel aksesibilitas laporan keuangan, yaitu:

1. Laporan keuangan dapat diakses
2. Laporan keuangan dipublikasikan melalui media umum.

2.1.5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1.5.1. Akuntabilitas Kinerja

Menurut Mardiasmo (2010), akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Sementara akuntabilitas kinerja menurut Instruksi Presiden No 7 tahun 1999, akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk menyajikan dan melaporkan segala bentuk kegiatan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak hanya terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan kemudahan informasi yang didapat maka masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam mengontrol kinerja dari instansi pemerintah sehingga tercapai pelayanan publik yang maksimal.

Dalam PERMENPAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 pasal 18, laporan Akuntabilitas Kinerja dimanfaatkan untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

2.1.5.2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (LAN dan BPKP, 2000):

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan Teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.1.5.3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis (LAN, 2003). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran. Laporan kinerja tahunan yang disusun secara sistematis ini berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Menurut Hatmoko (2018), LAKIP memiliki tujuan yaitu: (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, dan (2) Sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

2.1.5.4. Fungsi-fungsi LAKIP

Penyusunan LAKIP berdasarkan SAKIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, serta pengukuran dan evaluasi kinerja. Fungsi LAKIP menurut LIPI adalah sebagai berikut:

1. Suatu media hubungan kerja organisasi yang berfungsi sebagai informasi dan data yang telah diolah.
2. Wujud tertulis pertanggung jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang dan mandat, sehingga LAKIP berfungsi juga sebagai rapor dari pimpinan unit organisasi.

3. LAKIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan media akuntabilitas setiap instansi.
4. Sebagai media informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip *good governance* termaksud penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan.

2.1.5.5. Prinsip-prinsip LAKIP

Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu penyusunan laporan harus memperhatikan prinsip-prinsip lain agar kualitas laporan menjadi baik yaitu (LAN, 2003):

1. Prinsip Lingkungan
Isi laporan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, dan memuat keberhasilan maupun kegagalan
2. Prinsip prioritas
Isi laporan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan dan upaya-upaya tindak lanjutnya
3. Prinsip manfaat
Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

2.1.5.6. Manfaat LAKIP

LAKIP yang disampaikan oleh instansi pemerintah memiliki manfaat, di antaranya untuk (LAN, 2003):

1. Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi dimata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi.
2. Merupakan umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.
3. Dapat mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi.
4. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5. Menjadikan instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Laporan akan dikatakan bermanfaat apabila telah dapat menyajikan informasi yang kredibel kepada penggunanya. Dengan informasi yang kredibel tersebut, pengguna akan terpengaruh dalam melakukan pengambilan keputusan yang terbaik. Terdapat empat karakteristik kualitatif yang membuat informasi berguna bagi pengguna, yaitu:

1. Dapat dipahami
2. Relevan

3. Handal
4. Dapat diperbandingkan

2.2. Penelitian Terdahulu

2.2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Susanto (2018) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Pada BPKD Kota Belopa Kabupaten Luwu”. Sampel yang digunakan adalah pegawai bidang sekretariat, bidang aset, bidang akuntansi, dan bidang anggaran dengan jumlah 93 orang pada Kantor BPKD Kota Belopa Kabupaten Luwu dengan metode observasi, dokumentasi, serta penyebaran kuesioner. Alat uji yang digunakan adalah uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji normalitas, analisis regresi linier sederhana, analisis deskriptif, analisis koefisien determinasi (R^2), uji T. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah

Penelitian Zulfah, dkk (2017) dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kabupaten Aceh Utara”. Sampel yang digunakan adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Utara dengan metode penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data kuantitatif, alat analisis menggunakan regresi linier sederhana, pengujian hipotesis menggunakan uji t. Hasil Penelitian menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.

Penelitian Fahmi (2020) dengan judul “Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Kota Palopo”. Sampel yang digunakan adalah pegawai BPKAD Kota Palopo yang terdiri dari 69 responden metode penyebaran kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), Uji asumsi klasik (uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas), analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji F, uji t. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah kota Palopo.

Penelitian Fahyuni (2018) dengan judul “Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi dan Komitmen Manajemen Terhadap Akuntabilitas Kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sinjai”. Sampel yang digunakan adalah pejabat eselon satu, dua, tiga, dan empat pada BPKAD Kabupaten Sinjai. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji validitas dan uji reliabilitas, pengujian hipotesis, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas), analisis regresi linier berganda (uji koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t). Hasil penelitian menyatakan bahwa keterbatasan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, sedangkan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

2.2.2. Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 - Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Susanto (2018)	Independen: X ₁ =Sistem Pengendalian Internal Dependen: Y ₁ =Kinerja Pemerintah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Belopa Kabupaten Luwu	1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah
Zulfah, dkk (2017)	Independen: X ₁ =Sistem Informasi Akuntansi Dependen: Y ₁ =Kualitas Laporan Keuangan	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.	1. Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Fahmi (2020)	Independen: X ₁ =Penyajian Laporan Keuangan X ₂ =Aksesibilitas Laporan Keuangan Dependen: Y ₁ =Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pemerintah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo	1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. 2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.
Fahyuni (2020)	Independen: X ₁ =Keterbatasan Sistem Informasi X ₂ =Komitmen Manajemen Dependen: Y ₁ =Akuntabilitas Kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sinjai	1. Keterbatasan sistem informasi tidak berpengaruh akuntabilitas kinerja 2. Komitmen manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pengendalian internal menurut Romney dan Steinbart (2015) adalah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian terpenuhi. Sistem pengendalian internal diperlukan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Sistem pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja yang maksimal akan menghasilkan laporan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengguna. Semakin tinggi tingkat penerapan pengendalian internal dalam suatu instansi pemerintahan maka semakin tinggi juga tingkat pencapaian tujuannya. Pengendalian internal yang efektif juga akan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipercaya, pemanfaatan sumber daya organisasi akan lebih efektif dan efisien, serta dapat menurunkan tingkat pelanggaran hukum.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susanto (2018), sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan teori dan konsep yang ada, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ = Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor BPKD Kota Pematangsiantar

2.3.2. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem informasi akuntansi menurut Romney & Steinbart (2015) adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Sedangkan menurut Patel (2015), sistem informasi akuntansi merupakan sub sistem informasi dalam suatu organisasi di mana digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sub sistem dan mengelola informasi tersebut yang kemudian dikomunikasikan dan diproses untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi akan membantu instansi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Penerapan sistem informasi akuntansi yang baik dalam instansi pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah, serta membantu pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulfah, dkk (2017), sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan teori dan konsep yang ada, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ = Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor BPKD Kota Pematangsiantar

2.3.3. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2010), laporan keuangan merupakan hak publik yang harus disajikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Publik berhak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari instansi pemerintah atas pengelolaan keuangan yang sudah diamanahkan. Suatu instansi pemerintah harus dapat menghasilkan dan menyediakan informasi keuangan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, instansi pemerintah dituntut untuk dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses atau memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahmi (2020), aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan teori dan konsep yang ada, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ = Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor BPKD Kota Pematangsiantar